

**IMPLEMENTASI PROGRAM SDANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH MELALUI
PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

Ferdinand Daniel Henriquez

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ferdinandhenriquez@gmail.com

Kendry Widyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pendidikan Nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sikka dalam menekan angka putus sekolah, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai landasan analisis. Teori Grindle digunakan untuk mengkaji dua komponen utama implementasi kebijakan, yaitu Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks pelaksanaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi Content of Policy, Program Pendidikan Kesetaraan SKB Sikka telah memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat yaitu anak putus sekolah, serta memberikan manfaat nyata berupa peningkatan motivasi, disiplin belajar, dan kemampuan akademik peserta. Program juga menunjukkan fleksibilitas pengambilan keputusan tingkat lembaga serta pelaksana program (tutor dan pamong belajar) yang memiliki komitmen tinggi meskipun jumlahnya terbatas. Sumber daya pendukung tersedia namun belum memadai, terutama sarana pembelajaran dan fasilitas teknologi. Dari sisi Context of Implementation, efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, struktur organisasi SKB yang jelas, dan dukungan administratif dari Dinas Pendidikan. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa kondisi ekonomi peserta yang rendah, kurangnya dukungan keluarga, tuntutan pekerjaan, serta keterbatasan fasilitas. Meskipun demikian, responsivitas tutor yang tinggi melalui pendekatan

personal dan penyesuaian jadwal mampu menjaga keberlangsungan pembelajaran. Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori Grindle menunjukkan bahwa implementasi Program SKB Sikka sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan angka putus sekolah, meskipun efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, peningkatan dukungan keluarga, dan kebijakan pendukung dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Nonformal, SKB, Teori Grindle, Anak Putus Sekolah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Non-Formal Education Program at the Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Sikka Regency in reducing school dropout rates, using Merilee S. Grindle's implementation theory as the analytical framework. Grindle's theory is employed to examine two key components of policy implementation, namely the *Content of Policy* and the *Context of Implementation*. This research utilizes a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis follows the interactive model of Miles & Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, after which all findings are further examined through the lens of Grindle's theory. The results indicate that in terms of *Content of Policy*, the SKB's Equivalency Education Program has clear objectives, an appropriate target group school dropouts and provides tangible benefits such as increased learning motivation, improved discipline, and enhanced academic abilities. The program demonstrates flexibility in decision-making at the institutional level, supported by committed implementers (tutors and learning facilitators), despite their limited number. Learning resources are available but remain insufficient, particularly regarding facilities and educational technology. From the perspective of Context of Implementation, the effectiveness of the program is influenced by the strong commitment of implementers, a well-structured organizational system, and administrative support from the Education Office. However, several obstacles persist, including the low economic background of learners, limited family support, work-related demands, and insufficient learning facilities. Despite these challenges, tutors show high responsiveness by adopting personal approaches and adjusting learning schedules, ensuring continuity of the learning process. Overall, the analysis based on Grindle's theory shows that the implementation of the SKB Program in Sikka has been moderately effective in reducing school dropout rates. Nevertheless, its effectiveness can be further enhanced through strengthened resources, improved family involvement, and greater support from local government policies.

Keywords: *Policy Implementation, Non-Formal Education, SKB, Grindle's Theory, School Dropouts.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, dan mandiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sikka.

Fenomena putus sekolah di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga, serta hambatan sosial-budaya yang membatasi akses anak terhadap pendidikan formal. Anak-anak yang putus sekolah berisiko kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan alternatif yang mampu menyediakan jalur kedua bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) hadir sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan alternatif melalui program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, serta berbagai pelatihan keterampilan. Sebagai lembaga pendidikan nonformal, SKB memiliki fungsi strategis dalam menjangkau masyarakat yang tidak dapat terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Keberadaannya juga menjadi instrumen implementasi kebijakan pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan melalui pendekatan fleksibel dan berbasis kebutuhan peserta didik.

Meskipun memiliki peran penting, efektivitas implementasi program SKB sangat bergantung pada isi kebijakan, kinerja pelaksana, dukungan sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi peserta didik. Untuk memahami faktor-faktor tersebut secara komprehensif, kajian implementasi kebijakan diperlukan. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada Content of Policy dan Context of Implementation sebagai kerangka analisis. Melalui pendekatan ini, implementasi program SKB dapat dinilai dari kejelasan tujuan, sasaran, manfaat, serta kondisi lingkungan dan kapasitas lembaga dalam menjalankan kebijakan. Penelitian mengenai implementasi program pendidikan nonformal di SKB Kabupaten Sikka masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada penyebab anak putus sekolah atau peran pendidikan nonformal secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan pendidikan nonformal diimplementasikan melalui SKB serta sejauh mana program ini berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Sikka. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di SKB Kabupaten Sikka dalam perspektif teori Grindle serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik dan pendidikan nonformal,

serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi penanganan masalah putus sekolah secara lebih efektif.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik diwujudkan melalui berbagai program untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memastikan pemerataan layanan. Pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam sistem pendidikan formal. Kebijakan publik selalu melalui beberapa tahapan, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi. Implementasi merupakan tahap paling kritis karena menjadi tahap penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Pada tahap inilah keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dinilai secara empiris

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan mengacu pada proses menjalankan keputusan pemerintah agar mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak ahli menyebutkan bahwa implementasi merupakan inti dari kebijakan karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan oleh para pelaksana di lapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Sementara Edwards III menekankan empat faktor kunci dalam implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dari berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks, dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, kondisi internal organisasi pelaksana, serta dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu, analisis implementasi memerlukan kerangka teori yang mampu melihat kebijakan dari dua sisi: isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Salah satu teori yang memberikan pendekatan komprehensif adalah teori Merilee S. Grindle.

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. *Content of policy* mencakup kejelasan tujuan kebijakan, sasaran yang ingin dijangkau, manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diharapkan, ketersediaan sumber daya, serta fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat pelaksana. Semakin jelas isi kebijakan dan semakin memadai dukungan sumber daya, semakin besar peluang kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Sementara

itu, *context of implementation* berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan. Faktor-faktor seperti kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik organisasi pelaksana, tingkat kepatuhan serta responsivitas pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang mendukung, pelaksana yang responsif, dan struktur organisasi yang baik akan memperkuat keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya bergantung pada kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan pelaksana dan kondisi sosial di mana kebijakan diterapkan.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle merupakan salah satu kerangka analisis paling komprehensif dalam kajian implementasi kebijakan publik. Grindle memandang bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan dijalankan. Dengan demikian, implementasi tidak dapat dipahami sebagai proses administratif yang linier, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berinteraksi.

Secara konseptual, Grindle membagi faktor-faktor implementasi ke dalam dua komponen besar, yaitu Content of Policy (Isi Kebijakan) dan Context of Implementation (Konteks Pelaksanaan). Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Content of Policy (Isi Kebijakan)

Komponen ini berfokus pada substansi kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan di lapangan. Grindle menyatakan bahwa isi kebijakan menentukan seberapa besar komitmen pelaksana dan seberapa mudah kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Beberapa unsur penting dalam isi kebijakan meliputi:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi (Interests Affected)
Kebijakan selalu memengaruhi kelompok tertentu. Semakin besar kepentingan sasaran yang terlibat dan semakin relevan kebijakan dengan kebutuhan mereka, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi. Dalam konteks SKB, sasaran kebijakan adalah anak putus sekolah, remaja, dan masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan alternatif.
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (Type of Benefits)
Kebijakan dinilai efektif apabila memberikan manfaat yang jelas dan langsung dirasakan oleh penerima. Manfaat dalam pendidikan nonformal dapat berupa peningkatan kemampuan akademik, perubahan perilaku belajar, dan keterampilan fungsional.
- c. Tingkat perubahan yang diharapkan
Kebijakan dapat bersifat incremental (perubahan kecil) atau transformative (perubahan besar). Semakin besar tingkat perubahan yang diharapkan, semakin kompleks proses implementasi. Pendidikan kesetaraan di SKB mengharuskan perubahan signifikan, yaitu menurunkan angka putus sekolah dan mengubah perilaku belajar peserta.
- d. Posisi pembuat kebijakan (Position of Policy Maker)
Legitimasi pembuat kebijakan memengaruhi otoritas pelaksanaan.

Ketika pembuat kebijakan memiliki dukungan kuat, implementasi akan lebih mudah dilakukan.

- e. Sumber daya yang dialokasikan (Resources Committed)
Sumber daya mencakup tenaga pelaksana, fasilitas, dana, modul, dan waktu. Keterbatasan sumber daya sering menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi.
- f. Lokasi pengambilan keputusan (Decision-Making Locus)
Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan agar kebijakan dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan. SKB, misalnya, membutuhkan keleluasaan untuk mengatur jadwal belajar, metode mengajar, dan strategi pembinaan peserta.

2. Context of Implementation (Konteks Pelaksanaan)

Komponen ini menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di mana kebijakan diterapkan.

Unsur-unsur yang termasuk dalam konteks pelaksanaan meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor (Power, Interests, and Strategies of Actors)
Setiap kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Keberhasilan implementasi bergantung pada bagaimana aktor-aktor tersebut berkolaborasi, termasuk pemerintah daerah, pelaksana program, tutor, masyarakat, dan peserta didik.
- b. Karakteristik lembaga pelaksana (Characteristics of Institutions and Implementing Agencies)
Faktor ini mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, budaya kerja, serta kompetensi sumber daya manusia. Lembaga pelaksana yang kuat dan profesional cenderung menghasilkan implementasi yang lebih efektif.
- c. Kepatuhan dan responsivitas pelaksana (Compliance and Responsiveness of Implementers)
Responsivitas pelaksana mencerminkan sejauh mana mereka mampu menafsirkan kebijakan dengan tepat, menyesuaikan metode dengan kondisi penerima manfaat, dan menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan. Dalam pendidikan nonformal, responsivitas tutor sangat menentukan keberhasilan pembelajaran.
- d. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Socioeconomic and Political Conditions)
Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi partisipasi penerima manfaat. Misalnya, kemiskinan dapat menyebabkan peserta harus bekerja sambil belajar sehingga mengurangi kehadiran. Secara politik, dukungan pemerintah akan memperkuat kapasitas pelaksana.

Program Rehabilitasi

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan nonformal. SKB memiliki mandat untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak

terjangkau oleh pendidikan formal, termasuk anak putus sekolah, warga belajar usia dewasa, serta masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi terbatas. Program-program yang diselenggarakan oleh SKB dirancang untuk memberikan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) melalui pendekatan yang fleksibel, terjangkau, dan berbasis kebutuhan..

Secara umum, program SKB meliputi tiga kategori utama, yaitu pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, dan pelatihan keterampilan. Program pendidikan kesetaraan meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Program ini ditujukan bagi warga belajar yang telah berhenti sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel, SKB memberikan ruang bagi peserta untuk belajar sesuai dengan ritme dan kebutuhan mereka, termasuk pengaturan jadwal yang tidak kaku, metode pembelajaran yang variatif, dan pendekatan individual oleh tutor.

Selain pendidikan kesetaraan, SKB juga menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) yang berfokus pada peningkatan kemampuan praktis masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan tata boga, menjahit, pertanian, kerajinan tangan, teknologi informasi, dan keterampilan produktif lainnya. Tujuannya adalah membekali peserta dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka peluang kerja. Di samping itu, SKB mengembangkan berbagai pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan lokal, seperti pelatihan keaksaraan fungsional, pemberdayaan perempuan, serta program pembinaan minat dan bakat. Melalui ragam kegiatan tersebut, SKB berupaya menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan nonformal, SKB memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah formal. SKB menerapkan pembelajaran yang fleksibel, partisipatif, dan berpusat pada warga belajar. Tutor atau pamong belajar memainkan peran penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi peserta yang sering kali menghadapi hambatan belajar akibat latar belakang sosial-ekonomi rendah, tanggung jawab pekerjaan, serta minimnya dukungan keluarga. Di sisi lain, keberhasilan program SKB juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya seperti sarana prasarana, anggaran, media belajar, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Dalam konteks penanganan anak putus sekolah, SKB memegang peran strategis sebagai lembaga yang menyediakan jalur alternatif pendidikan. Program pendidikan kesetaraan yang dimiliki SKB memberikan kesempatan bagi anak dan remaja yang sebelumnya keluar dari sekolah untuk kembali mengikuti proses pendidikan hingga memperoleh ijazah yang diakui secara nasional. Selain itu, keterlibatan tutor yang responsif serta metode pembelajaran yang adaptif menjadikan SKB sebagai lembaga yang relevan dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di daerah.

Dengan demikian, Program SKB tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan nonformal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung pemerataan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam proses implementasi program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Sikka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara alamiah melalui kata-kata, tindakan, dan pengalaman para informan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2007), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku yang diamati, sedangkan Sugiyono (2009) menegaskan bahwa peneliti merupakan instrumen kunci dalam proses pengumpulan data. Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada proses, makna, dan dinamika implementasi kebijakan pendidikan nonformal pada konteks sosial tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Content of policy (Isi Kebijakan)

a. Program Pengelompokan dan Kepentingan Sasaran

Dalam upaya memahami bagaimana SKB menentukan kelompok sasaran dan memastikan bahwa program pendidikan kesetaraan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pelaksana dan menelaah data peserta didik di lapangan. Data menunjukkan bahwa 36,67% peserta didik berhenti sekolah karena faktor ekonomi, 33,33% karena sakit, dan 30% karena rasa malas atau kurangnya motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kesetaraan melalui SKB menargetkan kelompok yang memiliki hambatan multidimensi, baik sosial, ekonomi, maupun psikologis. Sebagai sebuah kebijakan yang bersifat korektif, SKB memberikan ruang bagi siswa yang berhenti sekolah untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan. Berdasarkan observasi dan wawancara, mayoritas peserta didik merupakan kelompok yang sulit dijangkau sekolah formal. Dengan demikian, sasaran program sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu memberikan akses pendidikan alternatif bagi kelompok rentan.

b. Jenis Manfaat yang di terima

Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran merupakan aspek penting dalam analisis isi kebijakan. Oleh karena itu, bagian ini membahas manfaat nyata yang dirasakan peserta didik selama mengikuti program SKB baik dalam bentuk keterampilan, peningkatan motivasi, maupun peluang akademik dan nonakademik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan SKB memang diarahkan untuk menjadikan lembaga ini sebagai tempat yang tepat bagi anak putus sekolah untuk kembali memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa SKB berperan sebagai sasaran yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang sebelumnya terhenti pendidikannya.

- c. **Derajat Perubahan Yang diharapkan**
Untuk menilai sejauh mana implementasi program pendidikan kesetaraan di SKB mampu mencapai tujuan kebijakan, perlu dianalisis derajat perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SKB menargetkan perubahan besar, terutama dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik kembali termotivasi untuk belajar dan memiliki target akademik yang lebih jelas. Tutor mendeskripsikan bahwa siswa mengalami perkembangan dari sisi kedisiplinan, kemampuan membaca, menulis, maupun dalam memahami materi pembelajaran. Perubahan ini sesuai dengan harapan pemerintah yaitu menghadirkan pendidikan alternatif yang fleksibel tetapi berkualitas. Derajat perubahan yang dicapai menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi berupaya membentuk perubahan perilaku belajar yang mendasar.
- d. **Lokasi Pengambilan Keputusan**
Lokasi pengambilan keputusan ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari pihak pelaksana, diperoleh gambaran mengenai bagaimana kewenangan didelegasikan dan sejauh mana lembaga pelaksana memiliki otonomi dalam menjalankan program SKB. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan program SKB berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka. Namun, pelaksanaan teknis diserahkan kepada kepala SKB, pamong belajar, dan tutor. Hal ini membuat proses implementasi bersifat desentralistik, di mana pengambilan keputusan sebagian besar dilakukan pada tingkat lembaga pelaksana sesuai kondisi lapangan. Kepala SKB memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jadwal, pembagian kelas, alokasi tutor, dan strategi pembelajaran. Tutor juga diberikan ruang untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, struktur pengambilan keputusan sangat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.
- e. **Sumber Daya yang tersedia**
Sumber daya ini meliputi tenaga pelaksana, sarana-prasarana, bahan ajar, serta kondisi peserta didik yang dapat mempengaruhi kehadiran dan kelancaran proses belajar. Melalui wawancara dengan pelaksana program, diperoleh informasi mengenai kekuatan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia di SKB. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Secara umum, pelaksanaan program SKB didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Namun demikian, terdapat keterbatasan pada sumber daya pendukung seperti sarana-prasarana, bahan ajar, dan jarak tempuh peserta didik. Beberapa siswa mengalami kendala kehadiran karena harus bekerja atau mengalami gangguan kesehatan,

yang terlihat dari data kehadiran di mana 16,66% peserta tidak hadir rutin. Keterbatasan ini menjadi hambatan yang memengaruhi kualitas proses pembelajaran, meskipun para tutor telah berupaya melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, meskipun sumber daya manusia cukup memadai, aspek fasilitas pendukung masih perlu diperkuat.

2. Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

a. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi Para aktor

Dalam implementasi suatu kebijakan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, termasuk bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi mereka saling berinteraksi. Aktor yang terlibat dalam implementasi program meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, kepala SKB, pamong belajar, tutor, dan peserta didik. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda namun saling mendukung, terutama dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi yang digunakan pelaksana sangat menekankan pendekatan humanis, seperti pembelajaran fleksibel, pendampingan individual, dan motivasi personal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik yang memiliki motivasi rendah atau latar belakang pendidikan yang terputus.

b. Karakteristik Kelembagaan pelaksana

Dalam teori Grindle, karakteristik kelembagaan pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa SKB Sikka memiliki struktur organisasi yang jelas serta jumlah tutor yang memadai. Walaupun fasilitas masih terbatas, lembaga mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Komitmen pimpinan lembaga sangat kuat dalam memastikan keberhasilan program, yang ditunjukkan melalui pengelolaan jadwal, koordinasi tutor, serta penyusunan program pembelajaran yang adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, SKB memiliki kapasitas implementasi yang cukup baik.

c. Tingkat Kepatuhan dan respon Pelaksana

Untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di SKB Sikka, penting untuk memahami bagaimana tingkat kepatuhan para pelaksana serta respons mereka terhadap tuntutan program. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan pelaksana terlihat dari konsistensi tutor dalam memberikan pengajaran dan pemantauan perkembangan siswa. Tutor berperan aktif dalam membantu siswa mengatasi hambatan belajar, sementara peserta didik menunjukkan antusiasme meskipun beberapa menghadapi kendala fisik atau pekerjaan. Keberhasilan implementasi terlihat dari meningkatnya kedisiplinan siswa dan kemampuan akademik mereka. Namun tingkat kehadiran yang tidak sepenuhnya stabil pada beberapa siswa menunjukkan bahwa kondisi eksternal masih menjadi tantangan yang memengaruhi kepatuhan peserta.

d. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam proses implementasi kebijakan, faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Faktor sosial dan ekonomi merupakan tantangan terbesar dalam implementasi program. Sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, bekerja sambil sekolah, atau mengalami masalah kesehatan. Kondisi ini memengaruhi stabilitas kehadiran dan kesiapan peserta dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun demikian, secara sosial masyarakat menunjukkan penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan SKB sebagai solusi alternatif pendidikan. Dukungan orang tua dan lingkungan menjadi faktor pendukung keberhasilan program.

e. Tingkat penerimaan Masyarakat

Untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan kesetaraan diterima oleh lingkungan sosial, penting untuk memahami respon masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan program SKB. Penerimaan masyarakat menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasi kebijakan, karena dukungan sosial dapat memperkuat keberlanjutan program dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik dan pihak pelaksana, diperoleh gambaran mengenai bagaimana masyarakat memandang program ini serta bentuk dukungan yang diberikan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerimaan masyarakat terhadap program SKB sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya motivasi peserta untuk melanjutkan pendidikan, serta dukungan keluarga terhadap kehadiran siswa di SKB. Program SKB dianggap sebagai peluang bagi anak putus sekolah untuk memperoleh ijazah dan meningkatkan kualitas hidup. Penerimaan masyarakat yang positif memberikan dampak langsung pada keberhasilan implementasi kebijakan, karena semakin besar dukungan sosial maka semakin mudah lembaga menjangkau dan mempertahankan peserta didik dalam program.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sikka dalam mengurangi angka putus sekolah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di SKB Kabupaten Sikka telah berjalan cukup efektif, dengan mengacu pada teori implementasi Merilee S. Grindle yang menilai dari aspek content of policy dan context of implementation. Program ini memiliki sasaran yang tepat, yaitu anak putus sekolah yang menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan motivasi belajar.
2. Dari sisi content of policy, program SKB memiliki:
 - 1) Tujuan yang jelas yaitu memberikan jalur pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah.

- 2) Manfaat nyata berupa peningkatan motivasi belajar, disiplin, kemampuan akademik, serta peluang memperoleh ijazah setara pendidikan formal.
- 3) Pelaksana program (tutor & pamong belajar) yang berkomitmen tinggi, meskipun jumlahnya masih terbatas.
- 4) Sumber daya yang mendukung, tetapi belum sepenuhnya memadai terutama fasilitas pembelajaran dan sarana teknologi.
3. Dari sisi context of implementation, pelaksanaan program dipengaruhi oleh:
 - 1) Struktur organisasi SKB yang jelas serta dukungan administratif Dinas Pendidikan.
 - 2) Komitmen dan responsivitas tutor yang tinggi, termasuk pendekatan personal dan fleksibilitas jadwal.
 - 3) Hambatan signifikan berupa ekonomi keluarga yang rendah, kurangnya dukungan orang tua, serta pekerjaan peserta yang membuat kehadiran tidak stabil.
4. Hambatan terbesar yang dihadapi SKB berasal dari eksternal lembaga, khususnya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
5. Secara keseluruhan, implementasi Program SKB Sikka berkontribusi penting dalam menurunkan angka putus sekolah, meskipun efektivitas dapat ditingkatkan melalui:
 - 1) Penguatan sarana dan prasarana,
 - 2) Penambahan jumlah tutor kompeten,
 - 3) Peningkatan dukungan keluarga,
 - 4) Kebijakan pendukung yang lebih kuat dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, SKB Kabupaten Sikka berhasil menjalankan fungsi pendidikan nonformal sebagai jalur alternatif yang mampu menjangkau anak putus sekolah dan membuka kembali kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. Houghton Mifflin.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

- Ni Ayu Krisna Dewi, et al. (2014). Analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak tahun 2013/2014.
- Hakim, A. (2020). Faktor penyebab anak putus sekolah. Jurnal Pendidikan.
- Ayunda Pratini Tefa. (2023). Analisis faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Suci Frisnoiry, et al. (2024). Analisis faktor penyebab anak putus sekolah. Jurnal Pendidikan dan Sosial.
- Mahrati Imaniar, et al. (2025). Peran pendidikan nonformal dalam mengurangi angka putus sekolah di wilayah pedesaan.
- Lanawaang, J. J. (2023). Faktor penyebab anak putus sekolah di Kelurahan Tuutu: Analisis Pasal 31 UUD 1945.
- Elmi Arsita, et al. (2022). Anak putus sekolah: Studi di masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Ahmad Yaneri, et al. (2022). Analisis penyebab anak putus sekolah bagi keluarga miskin.
- Ailsyah Putri Oktaviani, et al. (2023). Upaya penanganan anak putus sekolah dengan program Kejar Paket PKBM di Kelurahan Pucang Sewu.
- Ali Muhammad Budiman, et al. (2024). Implementasi hak pendidikan bagi anak putus sekolah melalui program kesetaraan.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- RPJMD Kabupaten Sikka 2025–2029.